PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**

UNIT KERJA : **DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASEP YONI ARDIANSAH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **689687**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 1.045.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/150 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, WARISAN Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 155.000.000**

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, FIAT SEDAN Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 132.194.602**

F. HARTA LAINNYA — **Rp. ----**

Sub Total — **Rp. 1.332.194.602**

III. HUTANG	**Rp.**	**40.000.000**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	**Rp.**	**1.292.194.602**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.